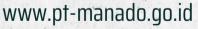
PENGADILAN TINGGI MANADO



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN **PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2023**



+62431848760



Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget -Manado 95259









ASLI GINTING, S.H., M.H.

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023 merupakan gambaran hasil yang telah dicapai berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado selama 1 (satu) tahun. Selain itu untuk memenuhi surat dari Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4108/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 di mana informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai dengan *outline* yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, Pengadilan Tinggi Manado menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, transparansi sekaligus evaluasi dalam penyempurnaan rencana kinerja pada tahun mendatang. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna baik bagi Pengadilan Tinggi Manado, Mahkamah Agung Republik Indonesia serta masyarakat.

Akhir kata, Saya menyampaikan terima kasih kepada aparatur peradilan baik di Pengadilan Tinggi Manado maupun Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado atas dedikasi dan partisipasinya dalam memberikan pelayanan kepada para pencari keadilan.

Manado, Januari 2024 Ketua Pengadilan Tinggi Manado

ASLI GINTING, S.H.,M.H.



MISI

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Manado;
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
- 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado; dan
- 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Manado.



22 JANUARI 1969



Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget - Manado 95259

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado meliputi Provinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari 8 (delapan) Pengadilan Negeri :



Pengadilan Negeri Manado Kelas IA



Pengadilan Negeri Bitung Kelas IB



Pengadilan Negeri Tondano Kelas IB



Pengadilan Negeri Kotamobagu Kelas IB





Pengadilan Negeri Tahuna Kelas II

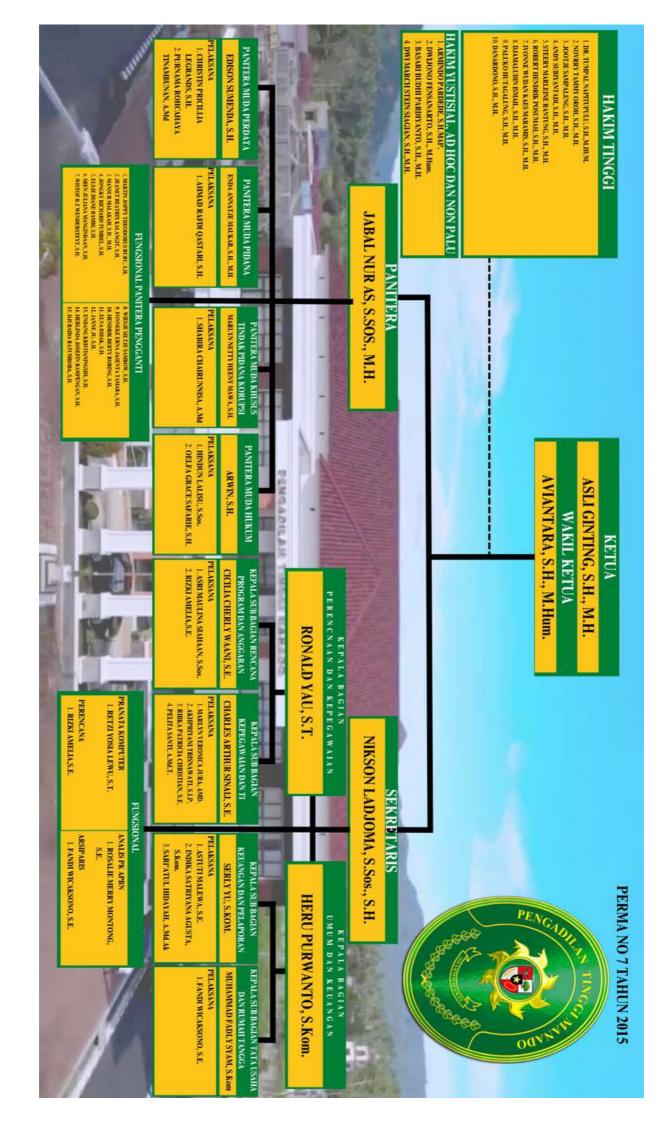


Pengadilan Negeri Amurang Kelas II



Pengadilan Negeri Melonguane Kelas II





DAFTAR ISI

KATA PE	GANTAR	. i
TENTAN	PENGADILAN TINGGI MANADO	ii
DAFTAR	[iv
DAFTAR	ABEL	vi
DAFTAR	AMBARv	iii
BAB I	PENDAHULUAN	.1
	A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN	.2
BAB II	KEADAAN PERKARA	.5
	A. KEADAAN PERKARA	.6
	1. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama	.6
	2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	.9
	3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	.9
	4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	10
	B. PENYELESAIAN PERKARA	11
	1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	11
	2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	12
	3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	l
	Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali	13
	4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	15
	5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversiī	16
	C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	۱7
	1. Posbakum	17
	2. Sidang Keliling	18
	3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	19
BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	21
	KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA	22
	1. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Manado2	22
	2. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri di	
	Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado	26

	A. MUTASI	27					
	B. PROMOSI	29					
	C. PENSIUN	30					
	D. DIKLAT	30					
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN						
	PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	34					
	A. PENGELOLAAN KEUANGAN	35					
	DIPA (01) Pengadilan Tinggi Manado	35					
	DIPA (03) Pengadilan Tinggi Manado	35					
	DIPA (01) Pengadilan Negeri	35					
	DIPA (03) Pengadilan Negeri	36					
	B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	36					
	1. Tanah dan Bangunan/Gedung	36					
	2. Kendaraan Dinas	38					
	3. Peralatan dan Mesin	38					
	C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	38					
	1. Implementasi E-Court	39					
	2. Implementasi SIPP	39					
BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	41					
	A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS	44					
	B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	45					
	C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK	47					
BAB VI	PENGAWASAN	52					
	A. INTERNAL	53					
	B. EVALUASI	54					
BAB VII	PENUTUP	55					
	A. KESIMPULAN						
	B. REKOMENDASI	57					

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Keadaan Perkara Pidana pada Tingkat Pertama	6
Tabel II.2. Keadaan Perkara Perdata pada Tingkat Pertama	7
Tabel II.3. Keadaan Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado	9
Tabel II.4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	9
Tabel II.5. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	10
Tabel II.6. Sisa Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado yang	
Diputus Tahun 2023	11
Tabel II.7. Sisa Perkara pada Pengadilan Negeri yang Diputus Tahun 2023	12
Tabel II.8. Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado yang	
Diputus Tepat Waktu	12
Tabel II.9. Perkara pada Pengadilan Negeri yang Diputus Tepat Waktu	13
Tabel II.10. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,	
Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Manado	13
Tabel II.11. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,	
Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Bitung	13
Tabel II.12. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,	
Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Tondano	14
Tabel II.13. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,	
Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Kotamobagu	14
Tabel II.14. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,	
Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Airmadidi	14
Tabel II.15. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,	
Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Tahuna	14
Tabel II.16. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,	
Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Amurang	14
Tabel II.17. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,	
Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Melonguane	14
Tabel II.18. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	16
Tabel II.19. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	17
Tabel II.20. Alokasi dan Realisasi Anggaran Posbakum	18

Tabel II.21. Pelaksanaan Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan18
Tabel II.22. Data Prodeo pada Pengadilan Negeri
Tabel III.1. Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Manado22
Tabel III.2. Komposisi Sumber Daya Manusia pada
Pengadilan Tinggi Manado22
Tabel III.3. Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri26
Tabel III.4. Mutasi Masuk Pengadilan Tinggi Manado27
Tabel III.5. Mutasi Keluar Pengadilan Tinggi Manado27
Tabel III.6. Mutasi Internal Antar Ruangan pada Pengadilan Tinggi Manado28
Tabel III.7. Mutasi dan Promosi Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri28
Tabel III.8. Promosi Jabatan pada Pengadilan Tinggi Manado29
Tabel III.9. Jumlah Hakim dan Pegawai Pensiun pada
Pengadilan Tinggi Manado30
Tabel III.10. Jumlah Hakim dan Pegawai Pensiun pada Pengadilan Negeri30
Tabel III.11. Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Manado yang
Mengikuti Diklat31
Tabel III.12. Jumlah Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri yang
Mengikuti Diklat33
Tabel IV.1. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Manado35
Tabel IV.2. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Tinggi Manado35
Tabel IV.3. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri
Tabel IV.4. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri
Tabel IV.5. Daftar Tanah dan Bangunan/Gedung36
Tabel IV.6. Daftar Kendaraan Dinas
Tabel IV.7. Daftar Peralatan dan Mesin
Tabel IV.8. Implementasi E-court
Tabel IV.9. Implementasi SIPP di Pengadilan Tinggi Manado40
Tabel V.1. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1. Ir	mplementasi SIPP	Pengadilan	Negeri	40
-----------------	------------------	------------	--------	----



BAB I

PENDAHULUAN

PENGADILAN TINGGI MANADO

- +62431848760
- Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget - Manado 95259
- www.pt-manado.go.id

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen Ketiga Bab IX Pasal 24 ayat (1) menyatakan Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung Tahun 2020 - 2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu. Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi serta salah satu puncak kekuasaan kehakiman mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen bidang administratif, personel, finansial serta sarana prasarana.

Tugas dan peran Mahkamah Agung menjadi makin menantang ketika kian banyak peradilan khusus dibentuk di bawah suatu lingkungan peradilan, di antaranya: Pengadilan Niaga, Pengadilan HAM, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kebijakan "satu atap" memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

Peran dan fungsi Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (*voorpost*) dari Mahkamah Agung, memiliki tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, pasal 51 menyatakan Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Manado sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di wilayah Provinsi Sulawesi Utara pun mengikuti garis pedoman dari Mahkamah Agung RI dalam menentukan arah kebijakan umum yang akan ditetapkan, di mana dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Pengadilan Tinggi Manado menyelenggarakan fungsi mengadili, fungsi pembinaan, fungsi pengawasan, fungsi administratif dan fungsi lainnya.

Adapun pedoman yang dijadikan acuan adalah:

- 1. Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 Mengenai Kekuasaan Kehakiman
 - a. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - b. Kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi; dan
 - c. Badan Badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang Undang.
- 2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- a. Pasal 1 ayat 1, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;
- b. Pasal 2 ayat 4, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;
- c. Pasal 56 ayat 1, Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum; dan
- d. Pasal 56 ayat 2, Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1-144/KMA/SK/I/ 2011 Tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- 5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- 7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 9. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- 10. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 11. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik; dan
- 12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Dengan ditetapkannya kebijakan umum tersebut di atas, maka diharapkan dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan tugas sehari-hari bagi para hakim dan pegawai di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.



BABII

A.KEADAAN PERKARA B.PENYELESAIAN PERKARA C.CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL





- +62431848760
- Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget - Manado 95259
- www.pt-manado.go.id

A. KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara di Tingkat Pertama

Berikut ini keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023:

No.	Jenis Perkara	Satuan Kerja									
		PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN		
		Manado	Bitung	Tondano	Kotamobagu	Airmadidi	Tahuna	Amurang	Melonguane		
	Pidana Biasa										
	Sisa 2022	62	27	50	66	34	16	21	5		
1	Masuk 2023	454	163	216	337	160	130	92	44		
	Putus 2023	411	169	218	363	161	124	99	43		
	Sisa 2023	105	21	48	40	33	22	14	6		
	Pidana Singkat										
	Sisa 2022	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Masuk 2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
	Putus 2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
	Sisa 2023	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pidana Cepat										
	Sisa 2022	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Masuk 2023	42	2	5	14	5	10	2	0		
	Putus 2023	42	2	5	14	5	10	2	0		
	Sisa 2023	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pidana Perikanan										
	Sisa 2022	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Masuk 2023	0	11	0	0	0	0	0	0		
	Putus 2023	0	11	0	0	0	0	0	0		
	Sisa 2023	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Tindak Pidana Korups	i									
	Sisa 2022	17	0	0	0	0	0	0	0		
5	Masuk 2023	34	0	0	0	0	0	0	0		

	Putus 2023	38	0	0	0	0	0	0	0
	Sisa 2023	13	0	0	0	0	0	0	0
	Pidana Anak								
6	Sisa 2022	0	0	3	0	0	0	1	0
	Masuk 2023	20	7	27	17	16	12	9	1
	Putus 2023	19	7	30	17	15	12	10	1
	Sisa 2023	1	0	0	0	1	0	0	0
	Pra Peradilan								
7	Masuk 2023	0	0	1	4	5	1	2	2
	Putus 2023	0	0	1	3	4	1	2	2
	Sisa 2023	0	0	0	1	1	0	0	0
8	Perkara Lalu Lintas	4296	5724	3895	4503	1621	1688	466	1224

Tabel II.1. Keadaan Perkara Pidana pada Tingkat Pertama

Berikut ini keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023 :

No.	Jenis Perkara	Satuan Kerja							
		PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN	PN
		Manado	Bitung	Tondano	Kotamobagu	Airmadidi	Tahuna	Amurang	Melonguane
	Perdata Gugatan								
	Sisa 2022	116	48	91	28	90	24	25	13
1	Masuk 2023	776	192	482	166	321	144	212	108
	Cabut 2023	20	14	12	6	42	6	4	0
	Putus 2023	705	191	420	154	277	138	189	111
	Sisa 2023	167	35	141	34	92	24	44	10
	Perdata Permohonan								
	Sisa 2022	1	1	6	0	3	1	0	0
2	Masuk 2023	644	212	618	101	361	119	141	17
	Cabut 2023	11	14	7	3	19	5	2	0
	Putus 2023	627	199	599	98	338	115	139	15

	Sisa 2023	7	0	18	0	7	0	0	2		
	Gugatan Sederhana										
	Sisa 2022	2	0	1	2	1	3	0	0		
3	Masuk 2023	84	25	26	117	27	11	8	3		
	Cabut 2023	0	4	2	9	14	0	2	0		
	Putus 2023	79	21	21	107	14	13	5	3		
	Sisa 2023	7	0	4	0	0	1	1	0		
	Perlawanan (derden v	erzet)									
	Sisa 2022	4	1	0	0	0	0	0	1		
	Masuk 2023	8	2	0	0	0	2	2	0		
4	Cabut 2023	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Putus 2023	4	3	0	0	0	0	1	1		
	Sisa 2023	8	0	0	0	0	0	1	0		
	Niaga										
	Sisa 2022	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Masuk 2023	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Cabut 2023	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Putus 2023	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sisa 2023	0	0	0	0	0	0	0	0		
	PHI										
	Sisa 2022	3	0	0	0	0	0	0	0		
6	Masuk 2023	20	0	0	0	0	0	0	0		
	Cabut 2023	1	0	0	0	0	0	0	0		
	Putus 2023	22	0	0	0	0	0	0	0		
	Sisa 2023	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tabel II.2. Keadaan Perkara Perdata pada Tingkat Pertama

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Berikut ini keadaan perkara pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023:

No.	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jumlah	Putus	Sisa
		2022	2023	Beban	2023	2023
1	Perdata	23	224	247	221	26
2	Pidana Biasa	13	139	152	142	10
3	Pidana Anak	1	15	16	16	0
4	Tindak Pidana Korupsi	3	24	27	27	0

Tabel II.3. Keadaan Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Berikut ini keadaan perkara tingkat kasasi pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023:

No.	Satuan Kerja	Jenis	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Keterangan
- 1	D 121 N 1 1	Perkara	40 D 1	
1.	Pengadilan Negeri Manado	Pidana	43 Perkara	
		Perdata	64 Perkara	
2.	Pengadilan Negeri Bitung	Pidana	5 Perkara	Termasuk pidana perikanan 2 perkara
		Perdata	24 Perkara	Perkara yang sudah dikirim 22
3.	Pengadilan Negeri Tondano	Pidana	Sisa Perkara Kasasi Th. 2022 : 7	Sisa Perkara Kasasi 14
			Perkara Kasasi yang Masuk Th. 2023 : 14	
			Perkara yang Diputus : 7	
	Perdata	Perdata	Sisa Perkara Kasasi Th. 2022 : 15	Sisa Perkara Kasasi 23
			Perkara Kasasi yang Masuk Th. 2023 : 14	
			Perkara yang Diputus : 7	
4.	Pengadilan Negeri Kotamobagu	Pidana	15 Perkara	
		Perdata	10 Perkara	
5.	Pengadilan Negeri Airmadidi	Pidana	Sisa Perkara Kasasi Tahun 2022 : 2	Sisa Perkara Kasasi 9
			Perkara Kasasi yang Masuk 2023 : 25	
			Perkara yang Diputus : 5	

		Perdata	Perkara Kasasi yang Masuk 2023 : 21	Sisa Perkara Kasasi 3
			Perkara yang Diputus :16	
6.	Pengadilan Negeri Tahuna	Pidana	Perkara Kasasi yang Masuk Th. 2023 : 6	TMS 1 Perkara
			Perkara yang Diputus : 5	
		Perdata	Sisa Perkara Kasasi Th. 2022 : 8	Sisa Perkara Kasasi 8
			Perkara Kasasi yang Masuk Th. 2023 : 8	
			Perkara yang Diputus : 8	
7.	Pengadilan Negeri Amurang	Pidana	8 Perkara	
		Perdata	9 Perkara	
8.	Pengadilan Negeri Melonguane	Pidana	6 Perkara	Putus : 2 Perkara
		Perdata	4 Perkara	Putus : 2 Perkara

Tabel II.4. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Berikut ini keadaan perkara tingkat peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023 :

No.	Satuan Kerja	Jenis Perkara	Mengajukan Upaya Hukum PK	Keterangan
1.	Pengadilan Negeri Manado	Pidana	8 Perkara	
		Perdata	11 Perkara	
2.	Pengadilan Negeri Bitung		4 Perkara	TMS: 1 Dikirim: 2 Cabut: 1
		Perdata	Sisa Perkara PK Th. 2022 : 1	Dikirim 4
			Perkara PK yang Masuk Th. 2023 : 3	
3.	Pengadilan Negeri Tondano	Pidana	-	
		Perdata	Sisa Perkara PK Th. 2022 : 1	Sisa Perkara PK : 1
			Perkara PK Masuk Th. 2023 : 5	
			Perkara yang Diputus : 1	
4.	Pengadilan Negeri Kotamobagu	Pidana	-	
		Perdata	-	
5.	Pengadilan Negeri Airmadidi	Pidana	Sisa Perkara PK yang Masuk Th. 2022 : 1	

			Perkara yang Diputus : 1	
		Perdata	Sisa Perkara PK yang Masuk Th. 2022 : 1	Sisa Perkara PK : 1
			Perkara PK yang Masuk Th. 2023 : 1	
			Perkara yang Diputus : 1	
6.	Pengadilan Negeri Tahuna	Pidana	Perkara PK yang Masuk Th. 2023: 2	Sisa Perkara PK : 1
			Perkara yang Diputus : 1	
		Perdata	Sisa Perkara PK Th. 2022 : 3	Sisa Perkara PK : 2
			Perkara PK yang Masuk 2023 : 1	
			Perkara yang Diputus : 2	
7.	Pengadilan Negeri Amurang	Pidana	-	
		Perdata	1 Perkara	
8.	Pengadilan Negeri Melonguane	Pidana	-	
		Perdata	-	

Tabel II.5. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Berikut ini jumlah sisa perkara pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2022 yang diputus pada Tahun 2023 :

Jenis Perkara	Sisa Perkara Th.	Sisa Perkara Th. 2022	Penyelesaian Sisa
	2022	yang Diputus Th. 2023	Perkara
Perdata	23	23	100%
Pidana Biasa	13	13	100%
Pidana Anak	1	1	100%
Tindak Pidana Korupsi	3	3	100%

Tabel II.6. Sisa Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado yang Diputus Tahun 2023

Berikut ini jumlah sisa perkara pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2022 yang diputus pada Tahun 2023 :

No.	Satuan Kerja		Pidana	P	'erdata
		Sisa	Sisa Perkara	Sisa	Sisa Perkara
		Perkara	Th. 2022 yang	Perkara	Th. 2022 yang
		Th. 2022	Diputus Th. 2023	Th. 2022	Diputus Th.
					2023
1.	PN Manado	81	81	119	119
2.	PN Bitung	27	27	50	50
3.	PN Tondano	53	53	98	98
4.	PN Kotamobagu	66	66	30	30
5.	PN Airmadidi	34	34	94	94
6.	PN Tahuna	16	16	28	28
7.	PN Amurang	22	22	25	25
8.	PN Melonguane	5	5	13	13

Tabel II.7. Sisa Perkara pada Pengadilan Negeri yang Diputus Tahun 2023

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan dan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Berikut rincian jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023 :

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Jumlah Perkara	Persentase
		Perkara	Putus Tepat	Penyelesaian Perkara
		Putus	Waktu	Tepat Waktu
1.	Perdata	221	221	100%
2.	Pidana Biasa	142	142	100%
3.	Pidana Anak	16	16	100%
4.	Tindak Pidana Korupsi	27	27	100%

Tabel II.8. Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado yang Diputus Tepat Waktu

No.	Satuan Kerja	P	Pidana		erdata
		Perkara Perkara yang		Perkara	Perkara yang
		Masuk	Diputus	Masuk	Diputus
		2023	Tepat Waktu	Th. 2023	Tepat Waktu
1.	Pengadilan Negeri Manado	519	402	1532	1252
2.	Pengadilan Negeri Bitung	192	186	431	387
3.	Pengadilan Negeri Tondano	249	201	1126	970
4.	Pengadilan Negeri Kotamobagu	435	434	414	377
5.	Pengadilan Negeri Airmadidi	181	178	709	623
6.	Pengadilan Negeri Tahuna	152	146	276	257
7.	Pengadilan Negeri Amurang	579	578	342	322
8.	Pengadilan Negeri Melonguane	52	46	141	129

Tabel II.9. Perkara pada Pengadilan Negeri yang Diputus Tepat Waktu

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali

Berikut rincian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023 :

No.	Pengadilan Negeri Manado	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum		
		Banding Kasasi		PK
1.	Perkara Pidana Biasa	4826	-	-
2.	Perkara Pidana Anak	20	2	2
3.	Perkara Perdata Gugatan	1240	19	6
4.	Perkara Tipikor	31	1	13
5.	Perkara PHI	23	_	-

Tabel II.10. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Manado

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK			
		Putus				
Peng	adilan Negeri Bit	ung				
1.	Pidana	5916	5905			
2.	Perdata	414	392			

Tabel II.11. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Bitung

No.	Satuan Kerja	Sisa Th. 2022	Jumlah Perkara		,		ya	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum		
			Masuk	Putus	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Peng	adilan Negeri T	ondano								
1.	Pidana Biasa	50	216	218	13	13	-	206	-	218
	Pidana Anak	3	27	30	2	1	-	28	1	30
2.	Gugatan	91	482	420	23		5	397	9	415

Tabel II.12. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Tondano

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara yang Diputus	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK)							
	Pengadilan Negeri Kotamobagu									
1.	Gugatan	160	142							
	Permohonan	101	100							
	Gugatan Sederhana	116	116							
2.	Pidana Biasa	363	333							
	Pidana Anak	14	2							
	Pidana Cepat	14	-							
	Pra Peradilan	3	3							

Tabel II.13. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Kotamobagu

No.	Satuan Kerja	Sisa Th.	Perkara Masuk	Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum			
		2022	Th. 2023	Banding	Kasasi	PK	
Pengadilan Negeri Airmadidi							
1.	Pidana Biasa	34	160	167	190	194	
	Pidana Cepat	-	5	4	5	5	
	Pidana Anak	-	16	12	16	16	
2.	Gugatan	90	321	282	267	319	
	Permohonan	3	361	364	364	364	
	Gugatan Sederhana	1	27	28	28	28	

Tabel II.14. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Airmadidi

No.	Satuan Kerja	Sisa Putusan	Jumlah Putusan PN 2023	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum		Mengaj	yang tid ukan Upa ukum		
				Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Peng	adilan Negeri Tahuna								
1.	Pidana Biasa	_	124	14	6	2	110	118	144
	Pidana Singkat	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pidana Cepat	-	10	-	-	-	10	10	-
	Pidana Anak	-	12	-	-	_	12	12	-

	Pra Peradilan	-	1	-	_	-	1	1	-
2.	Gugatan	5	138	13	16	4	125	122	264
	Permohonan	-	115	-	-	-	115	115	-
	Gugatan Sederhana	-	13	-	-	-	13	13	-
	Perlawanan/Bantahan	-	2	1	-	-	1	2	-

Tabel II.15. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Tahuna

No.	Satuan Kerja	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum		U		
			Banding	Kasasi	PK		
Peng	Pengadilan Negeri Amurang						
1.	Pidana	579		561			
2.	Perdata	342		319			

Tabel II.16. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Amurang

No.	Satuan Kerja	Perkara Masuk	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK	Keterangan
Peng	gadilan Negeri Melonguan	9		
1	Pidana Biasa	44	30	6 perkara masih berjalan
2	Pidana Singkat	-	-	-
3	Pidana Cepat	-	-	-
4	Pidana Anak	1	1	-
5	Pidana Pra Peradilan	2	2	-
6	Perdata Permohonan	17	17	2 Perkara masih berjalan
7	Perdata Gugatan	108	106	10 Perkara masih berjalan
8	Perdata Gugatan Sederhana	3	3	-

Tabel II.17. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Negeri Melonguane

4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim – hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Berikut ini rincian jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi tahun 2023 pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado:

No.	Satuan Kerja	Jumlah	Status Keberhasilan Mediasi			
		Perkara Mediasi	Berhasil	Tidak	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dalam Proses
1.	Pengadilan Negeri Manado	227	8	219	-	-
2.	Pengadilan Negeri Bitung	50	7	40	-	3
3.	Pengadilan Negeri Tondano	109	3	100	-	4
4.	Pengadilan Negeri Kotamobagu	47	1	42	2	2
5.	Pengadilan Negeri Airmadidi	115	11	92	4	8
6.	Pengadilan Negeri Tahuna	41	1	38	-	2
7.	Pengadilan Negeri Amurang	50	4	38	2	6
8.	Pengadilan Negeri Melonguane	22	4	16	2	-

Tabel II.18. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun atau telah berumur dua belas tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berikut ini rincian jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi tahun 2023 pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado:

No.	Satuan Kerja	Perkara	Jumlah	Status	Keberha	asilan Diversi
		Pidana Anak	Perkara Diversi	Berhasil	Tidak	Tidak Dapat Dilaksanakan/ Proses
1.	Pengadilan Negeri Manado	20	20	-	10	10
2.	Pengadilan Negeri Bitung	7	1	-	1	-
3.	Pengadilan Negeri Tondano	27	12	6	6	15
4.	Pengadilan Negeri Kotamobagu	14	1	1	-	0
5.	Pengadilan Negeri Airmadidi	16	5	1	3	1
6.	Pengadilan Negeri Tahuna	-	-	-	-	-
7.	Pengadilan Negeri Amurang	9	1	-	1	-
8.	Pengadilan Negeri Melonguane	-	-	-	-	-

Tabel II.19. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

1. Posbakum

Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Jenis layanan di Pengacara Piket Pengadilan berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan; dan
- c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokad lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Berikut alokasi dan realisasi anggaran Posbakum pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023 :

No.	Satuan Kerja	Jumlah	Realisasi	Keterangan
		Alokasi	Anggaran	
		Anggaran	Posbakum	
		(Rp)	(Rp)	
1.	Pengadilan Negeri	31.200.000	31.200.000	Kerja sama dengan LBH
	Manado			Bintang Keadilan Kartika
2.	Pengadilan Negeri	31.200.000	31.200.000	Kerja sama dengan
	Bitung			Yayasan Cakra Proletariat
				Bitung Indonesia (YCPBI)
3.	Pengadilan Negeri	16.800.000	16.800.000	-
	Tondano			
4.	Pengadilan Negeri	31.200.000	31.200.000	Kerja sama dengan
	Kotamobagu			Yayasan Bantuan Hukum
				Bolaang Mongondow
				Raya
5.	Pengadilan Negeri	24.000.000	24.000.000	Kerja sama dengan Pos
	Airmadidi			Bantuan Hukum PION
6.	Pengadilan Negeri	19.200.000	19.200.000	Kerja sama dengan Pos
	Tahuna			Bantuan Hukum Advokad
				Indonesia Sangihe
7.	Pengadilan Negeri			Kerja sama dengan LKBH
	Amurang			PION Cabang Amurang
8.	Pengadilan Negeri	24.000.000	24.000.000	-
	Melonguane			

Tabel II.20. Alokasi dan Realisasi Anggaran Posbakum

2. Sidang Keliling

Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar ternpat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Berikut data pelaksanaan layanan sidang di luar gedung pengadilan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023:

No.	Satuan Kerja	Jumlah Sidang Keliling	Lokasi Sidang Keliling
1.	Pengadilan Negeri Manado	-	-
2.	Pengadilan Negeri Bitung	1	Kantor Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung

3.	Pengadilan Negeri	-	-
	Tondano		
4.	Pengadilan Negeri	-	-
	Kotamobagu		
5.	Pengadilan Negeri	-	-
	Airmadidi		
6.	Pengadilan Negeri	4	2 (dua) Zitting Plaats yang lokasinya
	Tahuna		terletak di Kabupaten Kepulauan Siau,
			Tagulandang dan Biaro
7.	Pengadilan Negeri	-	-
	Amurang		
8.	Pengadilan Negeri	-	-
	Melonguane		

Tabel II.21. Pelaksanaan Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud, dibuktikan dengan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM),Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Berikut data prodeo pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023 :

No.	Satuan Kerja	Anggaran Perkara	Realisasi Anggaran Perkara Prodeo (Rp)	
		Prodeo (Rp)		
1.	Pengadilan Negeri	-	-	-
	Manado			
2.	Pengadilan Negeri	-	-	-
	Bitung			
3.	Pengadilan Negeri	670.000	667.000	99,95%
	Tondano			
4.	Pengadilan Negeri	1.340.000	1.200.000	89,55%
	Kotamobagu			
5.	Pengadilan Negeri	-	-	-
	Airmadidi			
6.	Pengadilan Negeri	-	-	-
	Tahuna			
7.	Pengadilan Negeri	670.000	668.900	99,70%
	Amurang			
8.	Pengadilan Negeri	1.340.000	982.500	73,32%
	Melonguane			

Tabel II.22. Data Prodeo pada Pengadilan Negeri



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

- **A.MUTASI**
- **B.PROMOSI**
- **C.PENSIUN**
- **D.DIKLAT**









- +62431848760
- Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget - Manado 95259
- www.pt-manado.go.id

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia pada beberapa pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado mengalami penurunan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi. Pada Pengadilan Negeri masih mengalami kekosongan pada beberapa formasi jabatan dan kekurangan sumber daya manusia khususnya tenaga staf atau pelaksana.

1. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Manado

Jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Manado sebanyak 60 (enam puluh) orang. Berikut ini rincian sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan:

No.	Keterangan	Jumlah		
1	Hakim Tinggi	11		
2	Hakim Ad Hoc Tipikor	2		
3	Hakim Yustisial	1		
4	Hakim Non Palu	1		
5	Pejabat Struktural	12		
6	Panitera Pengganti	15		
7	Pranata Komputer	1		
8	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	1		
9	Pelaksana Kepaniteraan Pidana	1		
10	Pelaksana Kepaniteraan Perdata	2		
11	Pelaksana Kepaniteraan Hukum	2		
12	Pelaksana Kepaniteraan Tipikor	1		
13	Pelaksana Sub Bag Tata Usaha dan Rumah Tangga	0		
14	Pelaksana Sub Bag Keuangan dan Pelaporan	3		
15	Pelaksana Sub Bag Rencana Program dan Anggaran	1		
16	Pelaksana Sub Bag Kepegawaian dan TI	4		
17	PPPK	2		
TOTA	TOTAL			

Tabel III.1. Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Manado

No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan	Pend.
1	Asli Ginting, S.H., M.H. 195804041984031002	Pembina Utama IV/e	Ketua Pengadilan	S2
2	Dr. Tumpal Napitupulu, S.H.,M.Hum. 196012271986031007	Pembina Utama IV/e	Hakim Utama / Hakim Tinggi	S3
3	Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H. 195911141986121001	Pembina Utama IV/e	Hakim Utama / Hakim Tinggi	S2
4	Jootje Sampaleng, S.H., M.H. 196002201988031007	Pembina Utama IV/e	Hakim Utama / Hakim Tinggi	S2

No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan	Pend.
5	Andy Subiyantadi, S.H., M.H. 196210281986121001	Pembina Utama IV/e	Hakim Utama / Hakim Tinggi	S2
6	Steery Marleine Rantung, S.H., M.H. 196303041988032003	Pembina Utama IV/e	Hakim Utama / Hakim Tinggi	S2
7	Robert Hendrik Posumah, S.H., M.H. 196005161991031003	Pembina Utama IV/e	Hakim Utama / Hakim Tinggi	S2
8	Ivonne Wudan Kaes Maramis, S.H., M.H. 196206061990032005	Pembina Utama IV/e	Hakim Utama / Hakim Tinggi	S2
9	Djamaludin Ismail, S.H., M.H. 196405291992121001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Utama Muda / Hakim Tinggi	S2
10	Paluko Hutagalung, S.H., M.H. 196007231992121001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Utama Muda / Hakim Tinggi	S2
11	Danardono, S.H., M.H. 196408141990011002	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim Utama Muda / Hakim Tinggi	S2
12	Armindo Pardede, SH. M.A.P. 195809121986021001	Pembina Utama IV/e	Hakim Utama/ Hakim Yustisial	S2
13	Dwijono Fensanarto, S.H., M.Hum. 1960012002201802007	-	Hakim Ad Hoc Tipikor	S2
14	Basari Budhi Pardiyanto, S.H., M.H. 1965040202201012019	-	Hakim Ad Hoc Tipikor	S2
15	Dwi March Stein Siagian, S.H.,M.H. 199303092017121006	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Hakim Non Palu	S2
16	Nikson Ladjoma, S.Sos., S.H. 197411012006041002	Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris	S1
17	Jabal Nur As, S.Sos., M.H. 196402071990031001	Pembina Tingkat I IV/b	Panitera	S2
18	Heru Purwanto, S.Kom. 198308292009041006	Penata Tingkat I III/d	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	S1
19	Ronald Yau, S.T. 198505022009121003	Penata Tingkat I III/d	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	S1
20	Enda Annatje Maukar, S.H.,M.H. 196608151993032003	Pembina Tingkat I IV/b	Panitera Muda Pidana	S2
21	Edison Sumenda, S.H. 196208241983031003	Penata Tingkat I III/d	Panitera Muda Perdata	S1

No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan	Pend.
22	Marlyn Netty Heeny Mawa, S.H. 196207221985032008	Penata Tingkat I III/d	Panitera Muda Tipikor	S1
23	Arwin, S.H. 197111021991031003	Penata Tingkat I (III/d)	Panitera Muda Hukum	S1
24	Serly Yu, S.Kom. 198009192006042002	Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Pelaporan	S1
25	Cicilia Cherly Waani, S.E. 197909102006042003	Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran	S1
26	Charles Arthur Sinaij, S.E. 197908112006041003	Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	S1
27	Muhammad Fadly Syam, S.Kom. 198203032009121005	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	S1
28	Martin Joppy Theodorus Ruru, S.H. 196203231985031006	Pembina Tingkat I IV/b	Panitera Pengganti	S1
29	Mansur Malakah, S.H., M.H. 196710041995101001	Pembina IV/a	Panitera Pengganti	S2
30	Jeanet Beatrix Kalangit, S.H. 196308071990032002	Pembina IV/a	Panitera Pengganti	S1
31	Hendrik Berty Roring, S.H. 196209131982031001	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1
32	Fonneke Erna Jasenta Tamara, S.H. 196410211990032001	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1
33	Elva Ishak, S.H. 196208011982032001	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1
34	Wiesje Siltje Sambow, S.H. 196209181982032002	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1
35	Mien Juliana Mangindaan, S.H. 196907271992032003	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1
36	Wistof R Z Wendersteyt, S.H. 196602241994031003	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1
37	Endang Kristianingsih, S.H. 196801181994032007	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1
38	Jongky Richard Tumbel, S.H. 196205101986031004	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1
39	Elsje Diane Rambi, S.H. 196908081994032002	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1
40	Herlinda Josefin Rampengan, S.H. 196904021989032001	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1
41	Djubaida Ratumboba, S.H. 196809051994032003	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1

No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan	Pend.		
42	Janne Ju, S.H. 196706051989032004	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti	S1		
43	Rosalie Merry Montong, S.E. 197706282009122001	Penata Tingkat I III/d	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S1		
44	Retzi Yosia Lewu, S.T. 198203092009122002	Penata III/c	Pranata Komputer Ahli Muda	S1		
45	Hindun Lalisu, S.Sos. 196805041998032004	Penata Tingkat I III/d	Operator - Penata Layanan Operasional	S1		
46	Astuti Malewa, S.E. 198104242009042010	Penata III/c	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	S1		
47	Christin Pricillia Legrands, S.H. 198705102012122001	Penata III/c	Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Perdata	S1		
48	Oelfa Grace Safarie 197210071992032004	Penata III/c	Penata III/c Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum			
49	Indika Satriyana Agusta, S.Kom. 199008152015031002	Penata III/c	S1			
50	Marlyn Veronica Jura, A.Md. 198803172009122001	Penata Muda III/b	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	D3		
51	Akhpriyani Trisnawati, S.I.P. 199304302019032011	Penata Muda Tingkat I III/b	7			
52	Ribka Patricia Christian, S.E. 199501112019032008	Penata Muda Tingkat I III/b	Operator - Penata Layanan Operasional, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	S1		
53	Asri Maulina Siahaan, S.Sos. 199106162022032006	Penata Muda III/a	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	S1		
54	Ahmad Rafdi Qastari, S.H. 199411262022031009	Penata Muda III/a	Klerek - Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana	S1		
55	Pelita Santi, A.Md.T. 199802192020122003	Pengatur II/c	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	D3		
56	Purnama Rohcahaya Tinambunan, A.Md. 199201312022032005	Pengatur II/c	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Perdata	D3		
57	Shabira Chairunnisa, A.Md. 199606132022032006	Pengatur (II/c)	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara, Panitera Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi	D3		
58	Sari'Atul Hidayah, A.Md.Ak. 199609092022032015	Pengatur (II/c)	Klerek - Pengolah Data dan Informasi, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	D3		
59	Fandi Wicaksono, S.E.	IX	Arsiparis Ahli Pertama	S1		
60	Rizki Amelia, S.E.	IX	Perencana Ahli Pertama	S1		

Tabel III.2. Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi Manado

2. Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado

Berikut jumlah sumber daya manusia Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado :

No.	Nama Jabatan	Satuan Kerja Pengadilan Negeri							
		Manado	Bitung	Tondano	Kotamobagu	Airmadidi	Tahuna	Amurang	Melonguane
	Jumlah	64	48	45	46	36	37	38	28
1	Ketua	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Wakil Ketua	1	1	-	-	-	1	1	-
3	Hakim	8	5	6	7	6	5	5	5
4	Hakim Adhoc Tipikor	3	-	-	+	-	-	-	-
5	Hakim Adhoc PHI	3	-	-	-	-	-	-	-
6	Hakim Adhoc Perikanan	-	4	-	+	-	-	-	-
7	Panitera	1	1	1	-	1	1	1	1
8	Sekretaris	1	1	1	1	1	1	1	1
9	Panmud Pidana	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Panmud Perdata	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Panmud Tipikor	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Panmud PHI	1	-	-	-	-	-	-	-
13	Panmud Hukum	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Panmud Perikanan	-	1	-	-	-	-	-	-
15	Panitera Pengganti	11	5	7	10	5	2	9	1
16	Jurusita	4	5	3	3	4	1	1	1
17	Jurusita Pengganti	4	2	1	2	-	-	-	1
18	Kasubbag PTIP	1	-	1	1	1	-	1	1
19	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	1	1	1	1	1	1	-
20	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	-	1	1	1	1	1	1	1
21	Tenaga Non Teknis	10	10	13	7	6	12	7	5
22	Tenaga Honorer	11	7	5	9	6	8	6	7

Tabel III.3. Komposisi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri

A. MUTASI

Selama tahun 2023 terdapat beberapa mutasi Hakim dan Pegawai baik mutasi masuk maupun mutasi keluar pada Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado :

No.	Nama	Jabatan Lama	Keterangan (Mutasi Dari)
1	Ribka Patricia Christian, S.E.	Analis Tata Laksana	PN Amurang
2	Pelita Santi, A.Md.T.	Pengelola Sistem Dan Jaringan	PN Melongaune
3	Enda Annatje Maukar, S.H.,M.H.	Panitera	PN Manado
4	Purnama Rohcahaya Tinambunan, A.Md.	Pengelola Perkara	PN Bitung
5	Nikson Ladjoma, S.Sos., S.H.	Sekretaris	PN Manado
6	Asli Ginting, S.H., M.H.	Ketua	PT Jayapura
7	Christin Pricillia Legrands, S.H.	Analis Perkara Peradilan	PT Sulawesi Tengah
8	Robert Hendrik Posumah, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	PT Maluku Utara
9	Paluko Hutagalung, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	PT Jayapura
10	Danardono,S.H	Hakim	PN Semarang
11	Jabal Nur As, S.Sos., M.H.	Panitera	PT Papua Barat
12	Fandi Wicaksono, S.E.	-	Penempatan : PPPK (Arsiparis Ahli Pertama)
13	Rizki Amelia, S.E.	-	Penempatan : PPPK (Perencana Ahli Pertama)

Tabel III.4. Mutasi Masuk Pengadilan Tinggi Manado

No.	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi Ke)
1	Deasy Franty Abdulkarim	PT Manado	PN Ternate
2	Yulianus Nolvy Kaunang, S.E.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Biro Renog BUA MARI
3	Hanung Marvieanto Nugroho, A.Md.	Pranata Komputer Pelaksana	PT Semarang
4	Frangki Tambuwun, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT Makassar
5	Yohanes Primada Dwi Arta, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	PT Semarang
6	Scolastica Dika Widiastuti, S.H.	Analis Perkara Peradilan	PN Tegal
7	Hani Nur Aini, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	PT Bandung
8	Andi Risa Jaya, S.H.,M.Hum.	Hakim Tinggi	PT Pontianak
9	M. Rozi Wahab, S.H.,M.H.	Hakim Tinggi	PT Palembang
10	Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	PT Palangkaraya

No.	Nama	Jabatan	Keterangan (Mutasi Ke)
11	Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT Makassar
12	Abdul Kohar, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT Nusa Tenggara Barat
13	Dr. Yapi.,S.H.,M.H.	Wakil Ketua	PT Pontianak
14	Lukman Bachmid, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	PT Maluku Utara
15	Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H.	Panitera	PT Makassar
16	Preity Puspita Pricylia Ogotan, S.H.	Analis Perkara Peradilan	PN Airmadidi

Tabel III.5. Mutasi Masuk Pengadilan Tinggi Manado

No.	Nama	Jabatan	Penugasan/Diperbantukan
1	Hindun Lalisu, S.Sos.	Pranata Kearsipan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pengadministrasi Registrasi Perkara Kepaniteraan Muda Hukum
2	Pelita Santi, A.Md.T.	Pranata Kearsipan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Pengelola Sistem Dan Jaringan Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
3	Shabira Chairunnisa, A.Md.	Pengelola Perkara Kepaniteraan Muda Hukum	Pengelola Perkara Kepaniteraan Muda TIPIKOR
4	Retzi Yosia Lewu, S.T.	Pranata Komputer - Ahli Muda di Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pranata Komputer - Ahli Muda di Kepaniteraan Pidana

Tabel III.6. Mutasi Internal Antar Ruangan pada Pengadilan Tinggi Manado

Berikut rincian mutasi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado tahun 2023 :

No.	Satuan Kerja	Jabatan	Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar	Promosi
1	Pengadilan	Ketua/Wakil	-	-	-
	Negeri	Hakim Karir	2	6	-
	Manado	Struktural	3	4	4
		Fungsional	6	8	4
		Pelaksana	-	1	-
2	Pengadilan	Ketua/Wakil	-	1	-
	Negeri Bitung	Hakim Karir	1	1	-
		Struktural	3	2	2
		Fungsional	1	4	5
		Pelaksana	-	-	-
3	Pengadilan	Ketua/Wakil	1	1	-
	Negeri	Hakim Karir	1	-	-
	Tondano	Struktural	1	1	-
		Fungsional	4	3	1

		Pelaksana	1	1	-
4	Pengadilan	Ketua/Wakil	1	1	-
	Negeri	Hakim Karir	-	1	-
	Kotamobagu	Struktural	-	2	1
		Fungsional	-	-	2
		Pelaksana	1	-	-
5	Pengadilan	Ketua/Wakil	-	-	-
	Negeri	Hakim Karir	-	2	2
	Airmadidi	Struktural	1	1	-
		Fungsional	6	4	5
		Pelaksana	-	-	-
6	Pengadilan	Ketua/Wakil	-	-	-
	Negeri Tahuna	Hakim Karir	-	-	-
		Struktural	1	-	-
		Fungsional	-	-	-
		Pelaksana	1	-	-
7	Pengadilan	Ketua/Wakil	1	1	-
	Negeri	Hakim Karir	-	1	-
	Amurang	Struktural	2	2	3
		Fungsional	3	3	3
		Pelaksana	-	-	-
8	Pengadilan	Ketua/Wakil	1	-	1
	Negeri	Hakim Karir	-	-	-
	Melonguane	Struktural	-	2	1
		Fungsional	-	-	-
	T. 1 1111 7 14 4	Pelaksana	-	1	-

Tabel III.7. Mutasi dan Promosi Hakim dan Pegawai di Pengadilan Negeri

B. PROMOSI

Sebagai bentuk pelaksanaan *reward* kepada aparatur peradilan yang dipandang cakap dan mampu menorehkan prestasi, serta mewujudkan proses pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan yaitu berupa usulan promosi maupun rotasi jabatan. Berikut promosi jabatan Hakim dan Pegawai di Pengadilan Tinggi Manado tahun 2023 :

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	Dr. Yapi.,S.H.,M.H	Wakil Ketua PT Manado	Wakil Ketua PT
1	D1. 1api.,3.11.,1vi.11	Wakii Ketua I I Wallauo	Pontianak
2	Lukman Bachmid, S.H., M.H.	Hakim Tinggi PT Manado	Wakil Ketua PT Maluku
	Eukinan bacillila, 5.11., W.11.	Tiakiiii Tiiiggi I I Wallado	Utara
3	Heru Purwanto, S.Kom.	Kasubbag Kepegawaian	Kabbag Umum dan
3	Tieru Furwanto, S.Kom.	dan Teknologi Informasi	Keuangan PT Manado
4	Ronald Yau, S.T.	Pranata Komputer Ahli	Kabbag Perencanaan dan
4	Konaid Tau, 5.1.	Muda	Kepegawaian PT Manado

5	Charles Arthur Sinaij, S.E.	Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi PT Manado
6	Muhammad Fadly Syam, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga PT Manado
7	Marten Teny Pietersz, S.Sos., S.H., M.H.	Panitera PT Manado	Panitera PT Makassar
8	Preity Puspita Pricylia Ogotan, S.H.	Analis Perkara Peradilan PT Manado	Panitera Pengganti PN Airmadidi

Tabel III.8. Promosi Jabatan pada Pengadilan Tinggi Manado

C. PENSIUN

Berikut rincian pensiun Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023 :

No.	Nama	Jabatan Terakhir
1	Dr. H. Lexsy Mamonto, S.H.,M.H.	Ketua PT Manado
2	Sinjo Maramis, S.H.	Hakim Tinggi
3	Nurhayati J. Ulaen, S.H.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian

Tabel III.9. Jumlah Hakim dan Pegawai Pensiun pada Pengadilan Tinggi Manado

No.	Satuan Kerja	Hakim dan Pegawai Pensiun Th. 2023
1	Pengadilan Negeri Manado	1
2	Pengadilan Negeri Bitung	-
3	Pengadilan Negeri Tondano	-
4	Pengadilan Negeri Kotamobagu	2
5	Pengadilan Negeri Airmadidi	-
6	Pengadilan Negeri Tahuna	-
7	Pengadilan Negeri Amurang	1
8	Pengadilan Negeri Melonguane	-

Tabel III.10. Jumlah Hakim dan Pegawai Pensiun pada Pengadilan Negeri

D. DIKLAT

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi ASN adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kompetensi pegawai. Tujuan diklat adalah meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap sebagai alat dalam melaksanakan tugas jabatan secara professional. Berikut rincian jumlah hakim dan pegawai yang mengikuti diklat pada Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023 :

No.	Peserta	Jabatan	DIKLAT YANG DIIKUTI	PENYELENGGARA
1	Rosalie Merry Montong, S.E.	APK APBN Ahli Muda	Program Pembelajaran PIPK bagi Kementerian/Lembaga	Kementerian Keuangan
2	Hani Nur Aini, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	Diklat Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis Angk. III Tahun 2023	ANRI
3	Nurhayati Juriana Ulaen, S.H.	Plt. Sekretaris	Bimbingan Teknis Kepegawaian Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado	Pengadilan Tinggi Manado
4	Charles Arthur Sinaij, S.E.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Bimbingan Teknis Kepegawaian Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado	Pengadilan Tinggi Manado
5	Marlyn Veronica Jura, A.Md.	Pengelola Kepegawaian	Bimbingan Teknis Kepegawaian Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado	Pengadilan Tinggi Manado
6	Arwin, S.H.	Panitera Muda Hukum	Bimbingan Teknis SOP Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/Korban TPPO	Sekretariat Daerah Prov. SULUT
7	Lukman Bachmid, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Sosialisasi Perlindungan Hukum Hak Keperdataan anak dibawah umur dan Pengampuan T.A. 2023	Balai Harta Peninggalan Makassar Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
8	Serly Yu, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Microlearning PPL PPSPM : Troubleshooting pada aplikasi SPM	Kementerian Keuangan
9	Cicilia Cherly Waani, S.E.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) wilayah Makassar Angk. I-V Tahun 2023	Balai Diklat PKN Sulawesi Selatan BPK RI
10	Muhammad Fadly Syam, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Rumah Tangga	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) wilayah Makassar Angk. I-V Tahun 2023	Balai Diklat PKN Sulawesi Selatan BPK RI
11	Rosalie Merry Montong, S.E.	APK APBN Ahli Muda	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) wilayah Makassar Angk. I-V Tahun 2023	Balai Diklat PKN Sulawesi Selatan BPK RI
12	Nurhayati Juriana Ulaen, S.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) wilayah Makassar Angk. I-V Tahun 2023	Balai Diklat PKN Sulawesi Selatan BPK RI
13	Heru Purwanto, S.Kom.	Kepala Bagian Umum dan	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif	Balai Diklat PKN Sulawesi Selatan BPK

No.	Peserta	Jabatan	DIKLAT YANG DIIKUTI	PENYELENGGARA
		Keuangan	(SPIP) wilayah Makassar Angk. I-V Tahun 2023	RI
14	Serly Yu, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) wilayah Makassar Angk. I-V Tahun 2023	Balai Diklat PKN Sulawesi Selatan BPK RI
15	Muhammad Fadly Syam, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha Rumah Tangga	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaporan Target / Proyeksi Output	Kanwil DJPB Prov. Sulut
16	Nurhayati Juriana Ulaen, S.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Bimbingan Teknis Perencanaan Tahun 2023	Pengadilan Tinggi Manado
17	Cicilia Cherly Waani, S.E.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Bimbingan Teknis Perencanaan Tahun 2023	Pengadilan Tinggi Manado
18	Asri Maulina Siahaan, S.Sos.	Analis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	Bimbingan Teknis Perencanaan Tahun 2023	Pengadilan Tinggi Manado
19	Rosalie Merry Montong, S.E.	APK APBN Ahli Muda	Program Pelatihan PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	BDK Manado
20	Indika Satriyana Agusta, S.Kom.	Penyusun Laporan Keuangan	Program Pelatihan PJJ Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	BDK Manado
21	Djamaludin Ismail, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan III bagi Hakim dan Panitera Peradilan Umum	Balitbang Diklat Kumdil
22	Astuti Malewa, S.E.	Bendahara	Bimbingan Teknis SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah	KPP Pratama Manado
23	Sari'atul Hidayah, A.Md.	Pengelola BMN	Bimbingan Teknis SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah	KPP Pratama Manado
24	Retzi Yosia Lewu, S.T	Pranata Komputer Ahli Muda	Training of Trainers GTA – Arsitektur SPBE Kominfo T.A. 2023	BPSDM Kominfo Kota Manado
25	Andy Subiyantadi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Bimbingan Teknis Penanganan Perkara Berbasis Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Umum Mahkamah	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

No.	Peserta	Jabatan	DIKLAT YANG DIIKUTI	PENYELENGGARA
			Agung RI T.A. 2023	
			Bimbingan Teknis Penanganan	
	Tumpal		Perkara Berbasis Keadilan	Direktorat Jenderal
26	Napitupuluh, S.H.,	Hakim Tinggi	Restoratif di Lingkungan	Badan Peradilan
	M.H.		Peradilan Umum Mahkamah	Umum
			Agung RI T.A. 2023	
		Hakim Tinggi	Bimbingan Teknis Penanganan	
	Lukman Bachmid,		Perkara Berbasis Keadilan	Direktorat Jenderal
27	S.H., M.H.		Restoratif di Lingkungan	Badan Peradilan
	5.Π., IVI.Π.		Peradilan Umum Mahkamah	Umum
			Agung RI T.A. 2023	

Tabel III.11. Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Manado yang Mengikuti Diklat

No.	Satuan Kerja	Jumlah Hakim dan Pegawai yang Mengikuti Diklat
1	Pengadilan Negeri Manado	20
2	Pengadilan Negeri Bitung	27
3	Pengadilan Negeri Tondano	15
4	Pengadilan Negeri Kotamobagu	11
5	Pengadilan Negeri Airmadidi	14
6	Pengadilan Negeri Tahuna	16
7	Pengadilan Negeri Amurang	7
8	Pengadilan Negeri Melonguane	12

Tabel III.12. Jumlah Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Negeri yang Mengikuti Diklat



BABIV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI









- +62431848760
- Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget - Manado 95259
- www.pt-manado.go.id

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Realisasi anggaran dan pengelolaan PNBP Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2023, sebagai berikut:

DIPA (01) Pengadilan Tinggi Manado

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp) %	SISA (Rp)	%
Belanja Pegawai	15.659.565.000	15.625.693.014 (99,78)	33.871.986	0,22
Belanja Barang	3.783.457.000	3.618.796.343 (95,65)	164.660.657	4,35
Belanja Modal	80.000.000	422.282.398 (98,78)	24.500	1,22
Jumlah	19.523.022.000	19.324.464.857 (98,98)	198.557.143	1,02

Tabel IV.1. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Manado

DIPA (03) Pengadilan Tinggi Manado

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp) %	SISA (Rp)	%
Belanja Pegawai	0	0	0	0
Belanja Barang	203.375.000	196.004.413 (96,38)	7.370.587	3,62
Belanja Modal	0	0	0	0
Jumlah	203.375.000	196.004.413 (96,38)	7.370.587	3,62

Tabel IV..2. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Tinggi Manado

DIPA (01) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado

NO.	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp) %	SISA (Rp)
1	Pengadilan Negeri Manado	12.209.973.000	11.970.686.096 (98,04)	239.286.904
2	Pengadilan Negeri Kotamubagu	6.440.789.000	6.147.631.251 (95,45)	293.157.749
3	Pengadilan Negeri Tahuna	5.705.665.000	5.468.705.756 (95,85)	236.959.244
4	Pengadilan Negeri Tondano	5.468.542.000	5.023.525.440 (91,86)	445.015.560
5	Pengadilan Negeri Melonguane	5.382.846.000	5.313.228.953 (98,71)	69.617.047
6	Pengadilan Negeri Bitung	7.524.578.000	7.488.725.510 (99,52)	35.852.490
7	Pengadilan Negeri Airmadidi	5.177.307.000	5.081.900.354 (98,16)	95.405.646
8	Pengadilan Negeri Amurang	4.935.987.000	4.931.147.214 (99,90)	4.839.786

Tabel IV.3. Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri

DIPA (03) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado

NO.	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp) %	SISA (Rp)
1	Pengadilan Negeri	218.095.000	217.182.358	912.642
	Manado		(99,58)	
2	Pengadilan Negeri	143.240.000	142.963.500	276.500
	Kotamubagu		(99,81)	
3	Pengadilan Negeri	305.047.000	292.607.610	12.439.390
	Tahuna		(95,92)	
4	Pengadilan Negeri	140.570.000	139.380.375	1.189.625
	Tondano		(99,15)	
5	Pengadilan Negeri	69.840.000	69.469.500	370.500
	Melonguane		(99,47)	
6	Pengadilan Negeri	143.500.000	142.767.650	732.350
	Bitung		(99,49)	
7	Pengadilan Negeri	81.600.000	80.098.030	1.501.970
	Airmadidi		(98,16)	
8	Pengadilan Negeri	105.670.000	105.148.815	521.185
	Amurang		(99,51)	

Tabel IV.4. Realisasi Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Dalam proses pengelolaan BMN sehingga dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi secara elektronik. Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado sudah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan informasi asset yang lengkap dan valid sekaligus mempermudah pengelolaan dan penatausahaan asset secara *real time*. Sarana dan prasarana kantor menurut jenis yang ada saat ini untuk Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado secara umum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tanah dan Bangunan/Gedung

No.	Satuan Kerja	Tanah dan Bangunan/Gedung	Jumlah (Unit)	Total Luas (m²)
1	Pengadilan	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	7	6.002
	Tinggi	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	58.782
	Manado	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	3.020
		Rumah Negara Gol. I Tipe A Permanen	1	290
		Rumah Negara Gol. I Tipe B Permanen	6	900
		Rumah Negara Gol. I Tipe C Permanen	4	280

		Pagar Permanen	4	1.878
		Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya	2	54
		0 , 0		7
		Gedung Pos Jaga Permanen	1	
		Taman Lainnya	1	1.070
		Jalan Khusus Lainnya	2	
		Jalan Lainnya	1	
2	Pengadilan	Tanah Bangunan Rumah Negara		3.814
	Negeri	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		35.005
	Manado	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	
		Taman Lainnya	1	
		Rumah Negara Golongan I Tipe B	2	
		Rumah Negara Golongan I Tipe C	11	
		Pagar Permanen	2	
		Jalan Lainnya	2	
3	Pengadilan	Gedung Bangunan Kantor	1	
	Negeri	Rumah Dinas Type B	5	
	Bitung	Rumah Dinas Type C	6	
4	Pengadilan	Gedung Bangunan Kantor	1	
	Negeri	Rumah Dinas	14	
	Tondano	Pagar Permanen	1	
5	Pengadilan	Gedung Bangunan Kantor	1	
	Negeri			
	Kotamobagu			
6	Pengadilan	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		1.290
	Negeri	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah		8.684
	Airmadidi	Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan		3.787
		Bangunan Gedung Kantor Permanen		2.706
		Bangunan Gedung Kantor Permanen		250
		Bangunan Fasilitas Umum Lainnya		100
		Taman Permananen		312
		Pagar Permanen		100
		Jalan Lainnya		500
7	Pengadilan	Gedung Bangunan Kantor	1	300
,	Negeri	Rumah Dinas	9	
	Tahuna	Ruman Dinas	9	
8	Pengadilan	Gedung Bangunan Kantor	1	
5	Negeri	Tanah/lahan yang digunakan untuk	*	2.190
	Amurang	bangunan kantor (Ex. Zetting Plazt)		2.170
9	Pengadilan	Gedung Bangunan Kantor	1	
,	Negeri	Scaling Dunganum Number	1	
	Melonguane			
	Microfiguatic	Tabel IV E Daftar Touch day Paragraph Coderns		

Tabel IV.5. Daftar Tanah dan Bangunan/Gedung

2. Kendaraan Dinas

No.	Satuan Kerja	Jenis Kendaraan		
		Kendaraan Roda 2	Kendaraan Roda 4	
1	Pengadilan Tinggi Manado	1	3	
2	Pengadilan Negeri Manado	11	4	
3	Pengadilan Negeri Bitung	3	3	
4	Pengadilan Negeri Tondano	3	3	
5	Pengadilan Negeri Kotamobagu	7	1	
6	Pengadilan Negeri Airmadidi	6	3	
7	Pengadilan Negeri Tahuna	5	3	
8	Pengadilan Negeri Amurang	4	4	
9	Pengadilan Negeri Melonguane	2	5	

Tabel IV.6. Daftar Kendaraan Dinas

3. Peralatan dan Mesin

No.	Satuan Kerja	Nama Aset	Jumlah (Unit)
1	Pengadilan Tinggi Manado	Peralatan dan Mesin (Extrakomptabel)	97
		Peralatan dan Mesin (Intrakomptabel)	1.119
		Monografi	3.359
		Alat Musik Modern/Band	1
2	Pengadilan Negeri Manado	Peralatan dan Mesin	1.913
		Monografi	5.730
3	Pengadilan Negeri Bitung	Peralatan dan Mesin	558
4	Pengadilan Negeri Tondano	Peralatan dan Mesin	5005
		Monografi	
5	Pengadilan Negeri Kotamobagu	Peralatan dan Mesin	140
6	Pengadilan Negeri Airmadidi	Peralatan dan Mesin	846
7	Pengadilan Negeri Tahuna	Peralatan dan Mesin	433
8	Pengadilan Negeri Amurang	Peralatan dan Mesin	626
9	Pengadilan Negeri Melonguane	Peralatan dan Mesin	<i>7</i> 5

Tabel IV.7. Daftar Peralatan dan Mesin

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Tata kelola teknologi informasi sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk memastikan penggunaan IT berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan Tekonologi informasi sangat penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan; mendukung tujuan organisasi; dan mendorong pertumbuhan dan inovasi. Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi merupakan momentum penting dalam peradilan Indonesia yaitu beralihnya system administrasi manual ke system administrasi peradilan elektronik. Terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang diikuti dengan

peluncuran aplikasi *e-court* telah membuka ruang bagi proses pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filing*) pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigations*) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

1. Implementasi E-court

E-court adalah pelayanan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkara secara online, mendapatkan tafsiran biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan secara online dan persidangan yang juga dilakukan secara elektronik.

No.	Satuan Kerja	Perkara yang Sudah Mendaftar Melalui E-court				Berhasil	
		Gugatan	Gugatan	Permohonan	Bantahan	Total	No.
			Sederhana				Perkara
1	Pengadilan	776	84	644	14	1518	1518
	Negeri Manado						
2	Pengadilan	173	25	207	5	410	410
	Negeri Bitung						
3	Pengadilan	476	26	613	6	1121	1121
	Negeri Tondano						
4	Pengadilan	165	117	101	1	384	384
	Negeri						
	Kotamobagu						
5	Pengadilan	321	27	361	-	709	709
	Negeri						
	Airmadidi						
6	Pengadilan	103	11	101	2	217	217
	Negeri Tahuna						
7	Pengadilan	212	8	141	2	363	363
	Negeri						
	Amurang						
8	Pengadilan	102	3	17	-	122	122
	Negeri						
	Melonguane						

Tabel IV.8. Implementasi E-court

2. Implementasi SIPP

Bahwa sistem administrasi Peradilan di Mahkamah Agung khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado telah melaksanakan sistEm administrasi secara elektonik yang dikenal dengan nama SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). SIPP dibuat untuk memudahkan akses dari para pencari keadilan terhadap proses perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan dan juga sebagai register perkara

secara elektronik yang terhubung dengan server di Mahkamah Agung. Dengan adanya SIPP maka bisa dipantau riwayat perkara tersebut dari proses pendaftaran hingga ke tahap akhir publikasi ke direktori putusan. Implementasi SIPP di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini yang diambil dari https://evaluasi.badilum.mahkamahagung.go.id/evaluasi:



Gambar III.1. Implementasi SIPP Pengadilan Negeri

No.	Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Tinggi Manado	
	Periode Januari – Desember 2023	
	Kriteria	Nilai
1	Rasio Penanganan Perkara Banding	93,55
2	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Banding	100
3	Jangka Waktu Pengiriman Kembali Berkas ke Pengadilan Pengaju	100
4	Rasio Pendaftaran Perkara Banding Secara Elektronik	12,28
5	Pelaksanaan Verifikasi Berkas Perkara	50
6	Pendaftaran Perkara Banding	50
7	Penetapan Majelis Hakim	49,87
8	Penunjukan Panitera Pengganti	49,76
9	Penetapan Hari Sidang	49,88
10	Input Penetapan Majelis Hakim / Hakim	40
11	Input Penunjukan Panitera Pengganti	39,81
12	Input Penetapan Hari Sidang	38,27
13	Input Pertimbangan Hukum	39,31
14	Input Putusan	39,51
15	Verifikasi Salinan Putusan Pada Perkara Banding Elektronik (eCourt)	48,81
16	TTE Salinan Putusan Perkara	50
17	Dokumen Elektronik Putusan	50
18	Presentase Upload ke Direktori Putusan	49,26

Tabel IV.9. Implementasi SIPP di Pengadilan Tinggi Manado



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
- B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
- C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK





- +62431848760
- Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget - Manado 95259
- www.pt-manado.go.id

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009). Intinya pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada stakeholder dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan stakeholder sekaligus memberikan kepuasan kepada stakeholder yang dilayani. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Berbagai upaya pun terus dilakukan oleh pemerintah dan aparaturnya dalam peningkatan pelayanan publik itu. Hal ini menjadi strategi atau upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia sepenuhnya dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Adapun beberapa strategi dalam peningkatan pelayanan public terserbut meliputi:

Budaya Pelayanan Prima

Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah adalah salah satu cara dalam menciptakan pelayanan publik yang baik kepada *stakeholder*. Diperlukan adanya aparatur yang profesional dengan sikap atau budaya melayani dengan setulus hati sehingga diharapkan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari *stakeholder* atas pelayanan yang diberikan. Satu hal lagi yang perlu dicermati dalam upaya peningkatan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan keprofesionalan pegawai terkait masalah *attitude* atau perilaku yaitu, diperlukan sikap mental yang baik dari setiap aparatur pemerintah yang langsung berhadapan dengan *stakeholder* dalam pemberian layanan. Dengan demikian peningkatan sumber daya manusia dan profesionalitas pegawai menjadi suatu aspek yang patut diperhatikan dalam upaya peningkatan pelayanan publik.

Standar Pelayanan Publik

Langkah selanjutnya sebagai salah satu cara peningkatan pelayanan publik yaitu dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya

peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Diharapkan dengan penerbitan kebijakan mengenai peningkatan pelayanan publik semakin mendorong terciptanya kualitas pelayanan yang efektif, efisien dan akuntabel. Dengan adanya standar yang baku diharapkan *stakeholder* akan semakin terpuaskan dengan setiap layanan yang diberikan oleh pemerintah. Selain untuk mempercepat proses pelaksanaan pelayanan publik bagi *stakeholder*, kebijakan pemerintah dengan menerbitkan standar pelayanan juga bertujuan memberikan jenis pelayanan beserta transparansi dan akuntabilitasnya kepada *stakeholder*. Sehingga dengan kebijakan itu, akan menghindari perilaku-perilaku menyimpang yang selama ini dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam memberikan layanan.

Peningkatan Fasilitas Penunjang

Selain memperhatikan kedua aspek di atas, sisi lain yang patut diperhatikan oleh pemerintah dalam upaya peningkatan pelayanan publik adalah dengan meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik tersebut. Sebab, tanpa didukung tersedianya fasilitas yang lengkap maka akan menghambat proses penyelenggaraan pelayanan publik kepada *stakeholder*. Ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana disadari atau tidak akan semakin mempercepat sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan untuk mewujudkannya maka tentunya diperlukan alokasi dana untuk penyediaan sarana dan prasarana tersebut. Dengan begitu, maka segala kendala yang menghalangi penyelenggaraan pelayanan publik kepada *stakeholder* akan dapat teratasi.

Penilaian Kepuasan Terhadap Layanan

Pelayanan yang sudah diberikan kepada *stakeholder* tidak akan dapat kita ketahui tanpa adanya penilaian. Penilaian menggambarkan sejauh mana pelayanan yang sudah kita berikan selama ini. Penilaian tersebut dapat berbentuk kuesioner maupun survei kepuasan. Dari hasil survey maupun kuesioner inilah nanti yang menentukan apakah pelayanan yang kita berikan sudah baik, cukup, ataukah masih perlu diperbaiki lagi.

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pada tahun 2023 Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Manado telah melaksanakan pemenuhan atas *evidence* yang diperlukan dalam Pembangunan Zona Integritas di mana senantiasa mengupayakan/mengusahakan agar selalu melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) untuk memperbaharui seluruh kegiatan beserta *evidence* kegiatannya. Berikut penilaian mandiri dan hasil evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado tahun 2023 :

No.	Satuan Kerja	Nilai		Rekomendasi
		Penilaian Mandiri	Evaluasi	
1	Pengadilan Negeri Manado	98,11	87,10	Diusulkan satker menuju WBK Tahun 2023
2	Pengadilan Negeri Bitung	98,40	88,96	Tidak diusulkan satker menuju WBK Tahun 2023
3	Pengadilan Negeri Tondano	99,26	87,13	Diusulkan satker menuju WBK Tahun 2023
4	Pengadilan Negeri Kotamobagu	99,43	95,03	Diusulkan satker menuju WBK Tahun 2023
5	Pengadilan Negeri Airmadidi	97,07	94,85	Diusulkan satker menuju WBK Tahun 2023

6	Pengadilan Negeri Tahuna	95,22	-	Tidak diusulkan satker menuju WBK Tahun 2023
7	Pengadilan Negeri Amurang	96,27	89,31	Tidak diusulkan satker menuju WBK Tahun 2023
8	Pengadilan Negeri Melonguane	-	-	-

Tabel V.1. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado telah melaksanakan PTSP sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Pada tahun 2023 pelaksanaan PTSP di seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado:

1. Pengadilan Tinggi Manado

Penanggungjawab pelaksanaan PTSP memberikan pengarahan kepada petugas PTSP setiap hari Senin;

2. Pengadilan Negeri Manado

Layanan pokok PTSP di Pengadilan Negeri Manado meliputi permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran biaya, penyerahan produk pengadilan, dan pengaduan. Layanan penunjang PTSP dilakukan oleh penyedia jasa eksternal antara lain Posbakum, bank, PT Pos dan pihak lainnya yang telah mengadakan kerja sama secara resmi dengan pengadilan;

3. Pengadilan Negeri Bitung

Perombakan terakhir PTSP dengan mengubah tata letak agar ruang PTSP lebih luas. Dengan menggunakan dana yang tersedia, diharapkan PTSP Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung Kelas 1B dapat mengikuti Standar yang telah

ditetapkan, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum diatas. Peningkatan pelayananpun terus ditingkatkan seperti ketrampilan petugas/operator, dan ketersediaan sarana prasarana penunjang.

4. Pengadilan Negeri Tondano

PTSP Pengadilan Negeri Tondano menyediakan layanan Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana serta Umum dan Keuangan.

5. Pengadilan Negeri Kotamobagu

Dalam rangka peningkatan pelayanan yang prima bagi pengguna pengadilan, maka Pengadilan Negeri Kotamobagu bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara Kotamobagu melaksanakan pelatihan bagi petugas PTSP.

6. Pengadilan Negeri Airmadidi

PTSP Pengadilan Negeri Airmadidi menyediakan mesin antrian pengunjung PTSP, meja *e-court*, inzage dan layanan disabilitas serta ruang tunggu PTSP.

7. Pengadilan Negeri Tahuna

Jumlah layanan pada PTSP Tahuna ada 4 (empat) di mana sepanjang tahun 2023 menmberikan layanan atas permohonan hukum 1.096, pidana 1.517, perdata 276 dan umum 1001.

8. Pengadilan Negeri Amurang

Ruang tunggu PTSP telah disediakan pelayanan GAKOTE bagi para pengunjung dan untuk para pengunjung antrian sidang telah disediakan tempat khusus dengan petugas dan fasilitas berupa TV, air minum dan AC serta telah terdapat juga tempat khusus bagi penyandang disabilitas dan jalur khusus disabilitas menuju ke ruang sidang.

9. Pengadilan Negeri Melonguane

PTSP Pengadilan Negeri Melonguane telah dilaksanakan dengan prinsip: Keterpaduan, Efektif, Efisien, Ekonomis; Koordinasi; Akuntabilitas; dan Aksesibilitas oleh Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Hukum, dan Sub Bagian Umum dan Keuangan untuk pelayanan administrasi pada Pengadilan Negeri.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan pelayanan publik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan public sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi. Dengan bahasa populer replikasi inovasi pelayanan publik dilakukan dengan proses yang mudah yaitu Amati, Tiru, dan Modifikasi atau disingkat dengan ATM.

Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambatnya peningkatan kualitas publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, sementara itu proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlansung dilakukan oleh Pemerintah yang mencita-citakan Pemerintahan Kelas Dunia (World Class Government) diharapkan tercapai di Tahun 2025. Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi, karena diharapkan akan berkembang dan berkelanjutan mendorong percepatan kualitas pelayanan publik.

Adapun inovasi pelayanan public pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai berikut:

Pengadilan Tinggi Manado masih menggunakan inovasi pelayanan publik berupa
 One Day service, One Day Minute, One Day Publish pada pelayanan public
 dimaksud adalah penyerahan berkas perkara minutasi sampai dengan kepada
 pihak pembanding;

2. Aplikasi AVATAR

Inovasi Penyumpahan Advokat berupa penyampaian permohonan penyumpahan advokat dan pendaftaran penyumpahan para Calon Advokat melalui website Pengadilan Tinggi Manado dapat dilakukan melalui website Pengadilan Tinggi Manado dan menerapkan one day service terhadap pelayanan penyerahan Berita Acara Penyumpahan Advokat 1 (satu) jam sejak pelaksanaan penyumpahan advokat; dan

3. Aplikasi SIJAWA

SIJAWA (Sasaran Kinerja Pegawai) yaitu aplikasi yang digunakan untuk penginputan dan pelaporan kinerja pegawai tiap bulannya.

4. Aplikasi SIM CUTI

SIM CUTI (Sistem Informasi Manajemen Cuti) adalah aplikasi yang digunakan oleh internal Pengadilan Tinggi Manado untuk manajemen dan administrasi serta monitoring cuti yang digunakan oleh seluruh ASN Pengadilan Tinggi Manado.

Berikut inovasi pelayanan publik pada satuan kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Manado:

Pengadilan Negeri Manado

Pengadilan Negeri Manado menerapkan inovasi Layanan SANDRA (Siap Mengantar Anda).

2. Pengadilan Negeri Bitung

- Aplikasi SiMANTAP

Aplikasi Layanan Permohonan Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung;

Aplikasi Si PDKT

Aplikasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Terintegrasi. Aplikasi hasil kerja sama antara Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung dengan Pemerintah Kota Bitung;

- Aplikasi CAKALANG

Pencatatan Peminjaman Berkas Pengadilan Negeri Bitung;

- Aplikasi POSBAKUM

Aplikasi pelaporan dan absensi dari advokat pemberi layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung; dan

 Melaksanakan sidang keliling meskipun tidak mendapat anggaran sidang keliling DIPA 03 T.A. 2023.

3. Pengadilan Negeri Tondano

 Sistem Informasi Persuratan Disdukcapil (SIPD) yang memudahkan Para Pencari Keadilan/Masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan yang terkait dengan produk Pengadilan Negeri Tondano seperti Pengiriman

- Salinan Putusan / Penetapan dan Akses Penelusuran Akta Cerai, Hak Pengasuhan Anak dan Pengangkatan Anak;
- Aplikasi Sistem Informasi Pidana (SIPID), dimana aplikasi ini memudahkan Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan perpanjangan penahanan, pengiriman salinan putusan, penetapan penggeledahan, dan persetujuan penyitaan;
- ACBP (Aplikasi Cek Biaya Perkara), di mana aplikasi ini memudahkan Para Pencari Keadilan dalam Mengecek Biaya Perkara;
- Ruang Pojok Baca untuk Para Pengunjung Sidang; dan
- Ruang Ramah Anak.

4. Pengadilan Negeri Kotamobagu

- Aplikasi SIRAYAP (Sistem Informasi Pembayaran Biaya Perkara) yaitu sistem yang dirancang ke dalam sebuah Aplikasi untuk mempermudah para pencari keadilan dalam melakukan perhitungan secara mandiri terhadap panjar biaya perkara di Pengadilan Negeri Kotamobagu;
- Aplikasi E-Tilang adalah aplikasi E-Tilang merupakan suatu aplikasi yang berfungsi untuk mengetahui informasi Besaran Denda Tilang yang telah diputus di Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang dapat diakses melalui internet;
- PERI KOTA (PTSP Electronic Information PN Kotamobagu) bertujuan untuk memaksimalkan Pelayanan Informasi Pengadilan agar mudah diakses dari mana saja;
- E-Form Dokumen yaitu suatu inovasi yang bertujuan untuk menyediakan formulir-formulir yang dapat diunduh secara online melalui website pengadilan;
- PTSP Online adalah aplikasi berbasis web yang memungkinan pengguna layanan pengadilan saling berkomunikasi dengan petugas PTSP per bagian yang dapat diakses melalui *website* PN Kotamobagu;
- Aplikasi Rol Sidang adalah aplikasi untuk memproses pemanggilan sidang di Pengadilan dapat dilakukan lebih mudah dan efisien; dan

- Aplikasi E-Posbakum adalah aplikasi E-Posbakum merupakan sistem informasi pelayanan bantuan hukum secara online kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Kotamobagu.

5. Pengadilan Negeri Airmadidi

- Pojok SAPURI (Salinan Putusan Mandiri)

Pengadilan Negeri Airmadidi telah membuat inovasi berupa penyediaan fasilitas terkait Salinan putusan dimana pihak bisa melakukan pencetakan mandiri melalui Pojok SAPURI;

- Aplikasi PU1ISAN (Pelayanan Terpadu 1 Pintu Secara Online)
 Pengadilan Negeri Airmadidi juga telah menghadirkan inovasi layanan digital
 lain berupa layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online; dan
- Desa Integritas
 Pengadilan Negeri Airmadidi mencanangkan inovasi baru untuk pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.

6. Pengadilan Negeri Tahuna

E-Labuh (Elektronik Layanan Bantuan Hukum)
 Aplikasi ini memberikan pelayanan berupa informasi dan pelayanan secara elektronik atas kegiatan bantuan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Tahuna; dan

Audiobook Online

Aplikasi ini dibuat khusus bagi para pencari keadilan yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas khususnya tuna netra.

7. Pengadilan Negeri Amurang

- E-Brosur adalah pelayanan secara mandiri berbasis elektronik yang dapat diakses oleh para pengguna layanan Pengadilan Negeri Amurang tanpa harus datang ke pengadilan namun hanya dengan men-scan QR code;
- Aplikasi SIVARAS
 - Aplikasi Sistem Layanan Reservasi Prioritas, adalah aplikasi yang bertujuan meningkatkan kinerja layanan di PTSP bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan pengadilan;
- Ruang tunggu PTSP telah disediakan pelayanan GAKOTE bagi para pengunjung; dan

 Untuk para pengunjung antrian sidang telah disediakan tempat khusus dengan petugas dan fasilitas berupa TV, air minum dan AC serta telah terdapat juga tempat khusus bagi penyandang disabilitas dan jalur khusus disabilitas menuju ke ruang sidang.

8. Pengadilan Negeri Melonguane

Pengadilan Negeri Melonguane telah melaksanakan Inovasi Pelayanan Publik yaitu:

- Tersedianya air minum gratis bagi pengunjung;
- Tersedianya berbagai Aplikasi untuk pelayanan secara digital; dan
- Tersedianya media sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat pencari keadilan untuk bersosialisasi dengan petugas Pengadilan misalnya untuk mengetahui kegiatan terbaru ataupun informasi terbaru di Pengadilan.



BAB VI

PENGAWASAN A.INTERNAL B.EVALUASI









- **(a)** +62431848760
- Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget - Manado 95259
- www.pt-manado.go.id

A. INTERNAL

Menindaklanjuti Maklumat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01/MAKLUMAT/KMA/IX/2017 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, Pengadilan Tinggi Manado secara konsisten melaksanakan pengawasan baik pengawasan pada Pengadilan Negeri maupun pengawasan bidang pada Pengadilan Tinggi Manado diterbitkannya Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor W19.U/196/SK/PS/7/2023 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi/Hakim Adhoc Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Manado.

Pengawasan Daerah

Pengawasan Daerah oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah melaksanakan pengawasan dua kali dalam satu tahun. Secara umum hasil pengawasan daerah tahun 2023 sebagai berikut :

- 1. Satuan kerja sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan baik meskipun ada beberapa temuan minor yang perlu ditindaklanjuti; dan
- 2. Kendala yang dihadapi oleh satuan kerja, salah satunya kondisi sarana dan pra sarana yang memerlukan pembaruan serta pengadaan.

Pengawasan Bidang

Pengawasan bidang dilakukan oleh Para Hakim Tinggi dan Hakim Adhoc Pengadilan Tinggi Manado selaku Pengawas Bidang yg dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado selaku Koordinator Pengawasan pada Pengadilan Tinggi Manado. Pengawasan dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan selanjutnya hasil dari Pengawasan tersebut dibuat dalam bentuk Laporan dan dilaporkan

kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado. Secara umum hasil pengawasan bidang tahun 2023 sebagai berikut :

- 1. Ada beberapa sarana dan pra sarana yang memerlukan pembaruan serta pengadaan; dan
- 2. Pada umumnya administrasi dan penyelenggaraan peradilan baik bidang teknis maupun kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Manado sudah berjalan dengan baik.

Di samping itu, pengawasan juga dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Jenjang pertama dilaksanakan antara Panitera Muda/Kepala Sub Bagian bersama dengan para Fungsional Umum/Staf. Jenjang selanjutnya dilakukan antara Kepala Sub Bagian bersama dengan Kepala Bagian. Selanjutnya rapat berjenjang dilakukan oleh Kepala Bagian dengan Sekretaris untuk bagian Kesekretariatan, dan Panitera Muda dengan Panitera untuk bagian Kepaniteraan.

Setiap permasalahan yang ditemui dalam rapat berjenjang tersebut kemudian diselesaikan dalam rapat-rapat evaluasi. Terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam rapat berjenjang tersebut, maka permasalahan tersebut dibawa dan dibahas dalam rapat dinas rutin setiap bulan

B. EVALUASI

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi atas SAKIP Tahun 2022 Pengadilan Tinggi Manado oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di mana Pengadilan Tinggi Manado memperoleh predikat BB (Sangat Baik). Selain itu juga, Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rapat yang dilaksanakan setiap bulan.

Pengadilan Tinggi Manado bertekad dan senantiasa berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang melekat terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc, Panitera, Sekretaris, Para Pejabat Struktural dan Fungsional serta Para Karyawan/Karyawati untuk mengontrol, mengawasi dan memastikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimaksud.



BAB VII

PENUTUP A.KESIMPULAN B.REKOMENDASI









- **(a)** +62431848760
- Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja, Kima Atas, Kec. Mapanget - Manado 95259
- www.pt-manado.go.id

A. KESIMPULAN

Selama tahun 2023 Pengadilan Tinggi Manado sudah melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- 1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Tinggi Manado telah dilaksanakan dengan baik;
- 2. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Manado telah dilaksanakan secara tepat waktu;
- 3. Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado telah berupaya secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana pra sarana yang tersedia:
- 4. Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado sudah menerapkan aplikasi *E-Court*;
- 5. Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado telah mengembangkan berbagai inovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap publik. Diharapkan inovasi tersebut sangat membantu dan memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi maupun pelayanan yang mereka butuhkan di pengadilan; dan
- 6. Pengawasan dan pembinaan baik pada Pengadilan Negeri maupun bidang/internal Pengadilan Tinggi Manado telah dijalankan secara objektif dan berkelanjutan serta adanya tindak lanjut setelah pengawasan dilaksanakan.

Selain hal - hal tersebut di atas Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado masih mengalami kendala :

- 1. Kurangnya sumber daya manusia. Masih terdapat kesenjangan kuantitas sumber daya manusia antara formasi kebutuhan ideal dengan kebutuhan riil; dan
- Kurangnya sarana dan prasarana gedung dan fasilitas perkantoran. Masih diperlukan pembaruan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan terwujudnya pengadilan/kantor yang ideal dan representatif.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado maka diperlukan:

- 1. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi maka perlu diadakan pelatihan oleh BLDK Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diikuti oleh Hakim dan Pegawai;
- 2. Selain itu perlu adanya penambahan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan.
- 3. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas perkantoran, pembangunan/renovasi gedung kantor dan rumah dinas.